CAKRA WIKARA INDONESIA

KAWAL PEMILU BERSAMA

FT. INDOPROGRESS

INDIKASI KECURANGAN PEMILU 2024, KITA BISA APA?

Halo, Sobat CWI!
Hayoo siapa yang ngikutin live report pemantauan pemilu CWI bersama IndoProgress TV 14 Februari kemarin??

Nah, kalau belum sempat simak live repotnya, yuk coba cek lembar fakta kali ini

Live report bersama IndoProgress TV kali ini nggak hanya menampilkan reportase pemantauan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS (Sulawesi, Sumatera, Jakarta, dan Maluku).

Tapi, juga menyajikan diskusi mengenai dinamika Pemilu 2024 kali ini, Sobat CWI!

Dinamika Pemilu

Yuk, kita simak rangkumannya!

Learn More

Bagaimana pandangan soal kecurangan dalam pilpres?

Dirga Ardiansa

"Kalau soal pilpres, menurut saya, kecurangan itu bukan hanya pada pengubahan hasil saat pemilu, tapi sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Ada kondisi yang tidak setara. Sumber daya yang dimanfaatkan, penggunaan fasilitas negara, tidak adanya cuti, sangat kaburnya peran pejabat formal yang turut terlibat, dan mungkin juga ada ancaman/intimidasi."

Jadi, menurut Dirga, justru yang menjadi pokok persoalan saat ini tidak hanya yang terjadi di TPS. Tapi, kecurangan sudah dikondisikan sedemikian rupa sebelum hari pemilihan, pun kalau KPU meminta ada pemilihan ulang di beberapa TPS yang melakukan kecurangan hasilnya tidak akan signifikan mengubah hasil saat ini...

Bagaimana mengantisipasi dan menyikapi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024?

Dirga Ardiansa

""Penting menyandingkan data kualitatif dan kuantitatif untuk bisa membuktikan bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Data kualitatif, seperti temuan di lapangan menjadi pintu masuk untuk melakukan gugatan, selanjutnya harus ditopang secara kuantitatif. ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersengketa hasil."

Dirga juga menyatakan bahwa pola kecurangan bisa dilihat oleh masyarakat bahkan sebelum pelaksanaan pemilu, sebagaimana yang diangkat dalam film dokumenter "Dirty Vote", nih Sobat CWI.

Apakah lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) masih bisa diharapkan?

Dirga Ardiansa

Yang perlu diperhatikan adalah fakta bahwa masyarakat sipil akan sangat mungkin untuk berhadapan dengan institusi-institusi besar. Jika data dari KPU menunjukkan hasil yang sama dengan QC, masyarakat sipil akan berhadapan dengan KPU.

Dirga Ardiansa

Pertanyaannya, apakah DKPP dan Bawaslu siap untuk membela masyarakat? Pengalaman sebelum pemilu dilaksanakan, Bawaslu cenderung 'membiarkan' dan DKPP tidak pernah memberikan putusan yang tegas pada KPU.

Apa yang bisa dilakukan terutama dalam konteks tahapan pemilu masih berjalan, penghitungan suara belum selesai, dan masih ada tahapan rekapitulasi, dan lain-lain?

Amalinda Savirani

Nah, kalau menurut Linda, yang harus dilakukan adalah menunggu hasil resmi Pemilu 2024 dari KPU. Lalu, penting juga untuk memikirkan jangka panjang. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan supaya gerakan masyarakat sipil bisa lebih solid dan bernafas panjang (berkelanjutan).

Real Count KPU

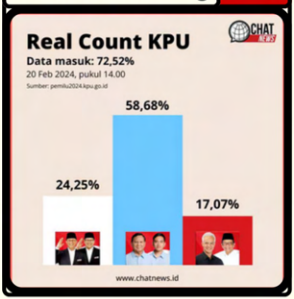

Bagaimana perolehan suara partai politik pada pemilu kali ini memengaruhi keseimbangan kekuatan politik di DPR nanti ?

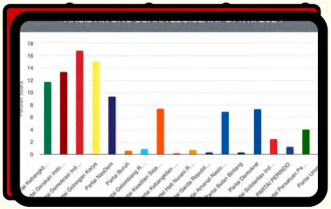

Amalinda Savirani

Ini dari sisi legislatif yang menurut laporan dari teman-teman di lapangan tadi masyarakat nggak terlalu tertarik. Kalau QC, saat ini angkanya PDIP sudah mencapai 19% dari Kompas. PDIP ini menarik karena tadinya kan dia mendukung presiden, tapi sekarang mempunyai usungan kandidat sendiri sekarang. PDIP punya potensi untuk menjadi oposisi di legislatif."

Negara kita sistemnya presidensial. Apakah masih mungkin ada mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif nanti?

Amalinda Savirani

Secara konstitusional, kita memang tidak mengenal sistem oposisi. Oposisi itu dibahas dalam aturan ketatanegaraan lain secara tidak tegas. Beda dengan AS, ketika yang satu kalah, maka yang lainnya akan menjadi oposisi. Di Indonesia, kita sudah sering melihat bagaimana partai yang kalah justru bergabung dengan gerbong pemerintah.

Amalinda Savirani

Dengan struktur ketatanegaraan ini, sulit sekali untuk bisa menjadi oposisi di negara ini. Tapi, kita berharap supaya partai yang menang di pileg dan partai yang capresnya kalah bisa menjadi poros oposisi.

Nah, Sobat CWI, kalau dari poin-poin diskusi yang sudah disampaikan, dalam jangka pendek, yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat sipil adalah mengawal hasil real count KPU dan mengumpulkan bukti-bukti kecurangan.

Diingat-ingat ya, real count masih berlangsung hingga 20 Maret 2024 mendatang, tentu hal ini menjadi momen kritis bagi kita semua untuk mengawasi terus pemilu tahun ini.

Yuk, kita awasi sama-sama!

Y u k !